

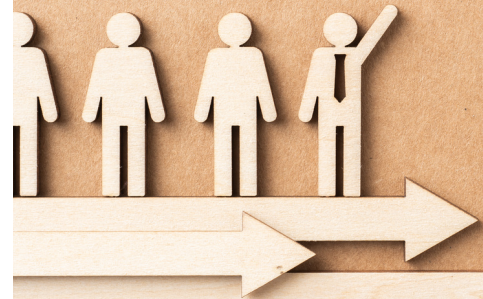


Salam Redaksi

Tulisan Ketua MPP PKS berikut ini mengajak kita melihat bahwa kekuatan sebuah partai politik tidak hanya ditentukan oleh gagasan besar, tetapi oleh kokohnya fondasi kelembagaan yang menopangnya. Melalui AD/ART PKS, penulis menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada nilai, sebagai prasyarat lahirnya partai yang mampu berperan secara kredibel dalam kehidupan berbangsa.

Dengan pendekatan yang reflektif sekaligus strategis, Dr. H. Mulyanto menunjukkan bahwa *Good Party Governance* bukan sekadar konsep normatif, melainkan praktik nyata yang tercermin dalam pembatasan kekuasaan, penguatan kaderisasi, dan demokrasi internal. Dari sinilah partai diharapkan tidak hanya bertahan sebagai organisasi politik, tetapi tumbuh menjadi institusi yang berkontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Selamat Membaca...



MPP PKS

eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsep Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



AD/ART PKS dan *Good Party Governance* Fondasi Kelembagaan untuk Kepeloporan Kebangsaan

Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
Ketua MPP PKS

Pendahuluan

Sebuah partai politik yang ingin berkontribusi secara berkelanjutan bagi bangsa tidak cukup hanya memiliki visi dan platform perjuangan. Ia harus ditopang oleh tata kelola kelembagaan yang kokoh, transparan, dan akuntabel.

Di sinilah arti penting Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

AD/ART bukan sekadar dokumen administratif, melainkan KONSTITUSI internal partai yang memandu arah, nilai, struktur, dan mekanisme pengelolaan organisasi.

Dalam kerangka visi kelembagaan, PKS menetapkan arah yang jelas:

“Menjadi Pelopor Dalam Perwujudan Cita-Cita Nasional, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila.”

Visi ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan semata demi kepentingan internal partai, melainkan sebagai sarana kontribusi bagi bangsa dan negara. Tata kelola partai yang baik (*Good Party Governance*) menjadi prasyarat agar PKS mampu menjalankan peran kebangsaan secara kredibel dan bermartabat.

Visi Kelembagaan dan Komitmen Kebangsaan

Visi kelembagaan PKS mencerminkan sikap kepeloporan dan kebangsaan yang tegas. PKS tidak memposisikan diri sebagai entitas yang berdiri di luar sistem negara, melainkan sebagai

bagian integral dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Komitmen terhadap cita-cita nasional—Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur—menjadi pijakan perjuangan kelembagaan partai.

KEPELOPORAN ini tidak bersifat retorik. Sejarah mencatat bahwa ketika PKS masih bernama Partai Keadilan (PK), partai ini mengambil posisi tegas dalam proses amandemen UUD 1945. PK berjuang agar Pembukaan UUD 1945 tidak diubah, karena di dalamnya termaktub Cita-Cita Nasional, Tujuan Nasional, Dasar Negara, serta suasana kebathinan para pendiri bangsa pada masa kemerdekaan.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pengakuan atas kedaulatan Tuhan, nilai keimanan, dan religiusitas bangsa Indonesia. Kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” menunjukkan bahwa bangsa Indonesia meletakkan dimensi spiritual sebagai fondasi kehidupan bernegara. Sikap PKS mempertahankan Pembukaan UUD 1945 adalah bukti konkret komitmen terhadap keutuhan konstitusi dan jati diri bangsa.

AD/ART sebagai Konstitusi Internal Partai

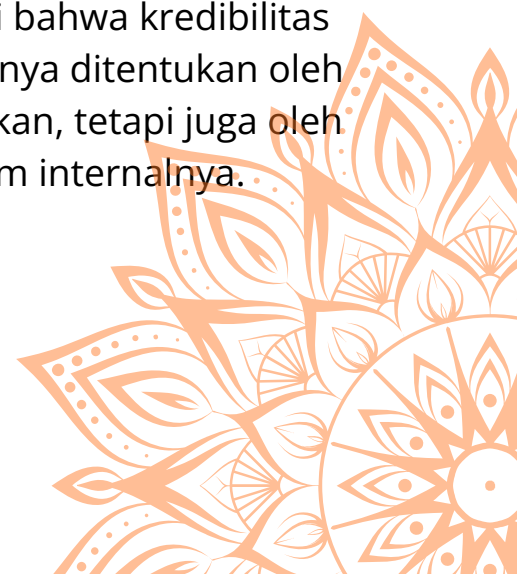
AD/ART PKS berfungsi sebagai instrumen normatif yang memastikan bahwa partai berjalan sesuai prinsip



demokrasi internal, akuntabilitas, dan kolektivitas kepemimpinan. Dokumen ini mengatur struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, sistem kaderisasi, serta pembatasan kewenangan pimpinan.

Dalam perspektif tata kelola modern, AD/ART adalah manifestasi komitmen partai terhadap prinsip-prinsip *Good Party Governance*. Prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta kepastian aturan main. Partai yang mengabaikan tata kelola internal berisiko terjebak dalam personalisasi kekuasaan dan konflik internal yang merusak.

PKS menyadari bahwa kredibilitas publik tidak hanya ditentukan oleh retorika kebijakan, tetapi juga oleh integritas sistem internalnya.



Sebuah partai politik yang ingin berkontribusi secara berkelanjutan bagi bangsa tidak cukup hanya memiliki visi dan platform perjuangan. Ia harus ditopang oleh tata kelola kelembagaan yang kokoh, transparan, dan akuntabel. Di sinilah arti penting Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pembatasan Masa Jabatan sebagai Implementasi *Good Party Governance*

Salah satu bentuk konkret implementasi *Good Party Governance* dalam AD/ART PKS adalah pembatasan masa jabatan pimpinan partai maksimal dua periode.

Ketentuan ini berlaku bagi Ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden Partai, Ketua Dewan Syariah Pusat,

Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan jabatan teras lainnya.

Pembatasan ini memiliki makna strategis dan etis. **Pertama**, mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu figur atau kelompok tertentu. **Kedua**, mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan. **Ketiga**, memastikan dinamika organisasi tetap hidup dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam praktik politik modern, pembatasan masa jabatan adalah indikator kedewasaan institusi. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dipandang sebagai amanah yang terikat waktu, bukan hak permanen. Dengan mekanisme ini, PKS menegaskan komitmennya pada prinsip kolektivitas dan kaderisasi kepemimpinan.

Kaderisasi dan Kepemimpinan Transformasional

Good Party Governance tidak hanya soal aturan formal, tetapi juga tentang budaya organisasi. PKS menempatkan kaderisasi sebagai jantung penguatan kelembagaan.

Proses pembinaan berpola, bertahap dan berjenjang memastikan bahwa setiap kader memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi.

Kepemimpinan dalam PKS diarahkan pada model transformasional, yaitu kepemimpinan yang menginspirasi, mendorong perubahan positif, serta membangun partisipasi kolektif. Kepemimpinan bukan sekadar bersifat manajerial, tetapi juga berdimensi moral dan visioner. Dan sudah barang tentu bukan kepemimpinan yang bersifat transaksional.

Pembatasan masa jabatan dalam AD/ART memperkuat mekanisme kaderisasi ini. Regenerasi yang terstruktur menjamin kesinambungan visi, sekaligus membuka ruang inovasi dan penyegaran organisasi.

AD/ART dan Demokrasi Internal

Salah satu indikator partai modern adalah kuatnya demokrasi internal. PKS mengatur mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif melalui struktur Majelis Syura dan perangkat organisasi lainnya.

Prinsip syura (musyawarah) menjadi landasan etik dan organisatoris dalam menentukan kebijakan strategis partai.

Dengan demikian, keputusan tidak bergantung pada satu figur tunggal, tetapi melalui mekanisme kolektif yang terinstitusionalisasi. Ini merupakan bentuk penguatan legitimasi internal sekaligus pendidikan politik bagi kader.

Kontribusi terhadap Indonesia Madani

Penguatan AD/ART dan tata kelola partai bukan tujuan akhir. Semua itu diarahkan untuk memperkuat kontribusi PKS dalam mewujudkan Indonesia Madani yang adil secara hukum dan demokrasi, sejahtera dalam ekonomi rakyat, serta bermartabat dalam kehidupan sosial dan budaya.

Partai yang tata kelolanya baik akan lebih mampu menghadirkan kebijakan publik yang berkualitas. Integritas internal menjadi prasyarat integritas eksternal.

Dengan sistem yang akuntabel dan transparan, PKS berupaya menjadi contoh bahwa partai politik dapat dikelola secara profesional tanpa meninggalkan nilai.

Salah satu indikator partai modern adalah kuatnya demokrasi internal. PKS mengatur mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif melalui struktur Majelis Syura dan perangkat organisasi lainnya. Prinsip syura (musyawarah) menjadi landasan etik dan organisatoris dalam menentukan kebijakan strategis partai.



Penutup

AD/ART PKS merupakan fondasi kelembagaan yang menegaskan komitmen partai terhadap prinsip demokrasi internal, kaderisasi, dan tata kelola modern. Melalui pembatasan masa jabatan pimpinan, penguatan musyawarah, serta sistem kaderisasi yang berjenjang, PKS menerapkan prinsip *couta* secara nyata.

Visi kelembagaan PKS—menjadi pelopor dalam perwujudan cita-cita nasional dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila—hanya dapat terwujud jika partai dikelola dengan integritas dan profesionalitas. Sejarah sikap PKS dalam mempertahankan Pembukaan UUD 1945 menunjukkan konsistensi komitmen kebangsaan tersebut.

Dengan tata kelola yang kokoh dan beretika, PKS berupaya menghadirkan politik yang bermartabat, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sebagai bagian dari ikhtiar panjang menuju Indonesia Madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Menkopolkam dan BRIN mencermati ini dan memberi penghargaan tertinggi, sebagai partai berintegritas, dua tahun berturut-turut kepada PKS.#

